SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Maudy Safitri

NIM. E1032211066

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

Oleh:

Maudy Safitri

NIM. E1032211066

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN PEMERINTAH DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung jawab yuridis pada:

Maudy Safitri

E1032211066

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing pertama

Dr. Sri Maryuni, M.Si

NIP.196503021990022001 Tanggal….

Dosen Pembimbing kedua

Bima Sujendra, S.IP, M.Si

NIP.198805072014041002 Tanggal….

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN PEMERINTAH DESA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA MUARA BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
Maudy Safitri
NIM. E1032211066

Dipertahankan di : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 24 April 2025
Waktu : 10.00-Selesai
Tempat : Ruang Sidang I

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Sri Maryuni, M.Si	Bima Sujendra, S.IP, M.S.i
NIP. 196503021990022001	NIP. 198805072014041002
Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. S.Y. Pudjianto, M.Si	Haunan Fachry Rohilie, S.I.P., M.A
NIP. 196011141987031003	NIP. 199003182019031010

Disahkan oleh :
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos., M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian yaitu Sekretaris Desa Muara Baru, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Muara Baru, Kepala BPD dan juga masyarakat Desa Muara Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga pembahasan, Pertama, peran pemerintah desa sebagai regulator dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur di Desa Muara Baru, masih belum ada kebijakan khusus yang dibuat oleh desa ini, namun pemerintah desa sudah melakukan atau melaksanakan musyawarah desa yang mana pada rapat atau musyawarah ini dapat menjadi wadah untuk masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka terkait pembangunan desa. Kedua, peran pemerintah desa sebagai dinamisator masih belum optimal atau pemerintah desa belum menjalankan peran dinamisator dengan baik, karena kurang meratanya sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga masih banyak masyarakat desa yang belum merasakan adanya pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan. Ketiga, peran pemerintah desa sebagai fasilitator telah dilaksanakan dengan baik. Pemerintah desa telah memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk pembangunan dengan menyediakan fasilitas tersebut pemerintah desa berharap masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Muara Baru diharapkan dapat menyusun kebijakan khusus yang mengatur partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa. Pemerintah Desa perlu memastikan bahwa sosialisasi dilakukan secara menyeluruh dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil. Pemerintah Desa diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh masyarakat termasuk di wilayah terpencil memiliki akses yang sama terhadap fasilitas yang disediakan agar pembangunan merata di seluruh desa, pemerintah desa juga perlu melakukan evaluasi terhadap kualitas dan jumlah fasilitas yang tersedia.

Kata Kunci: Dinamisator, Fasilitator, Pembangunan, Pemerintah Desa, Regulator.

ABSTRACT

This study aimed to describe and analyze the role of the village government in improving the participation of the community in the development of infrastructure in the Muara Baru Village of Sungai Raya District in Kubu Raya Regency. This study employed a descriptive qualitative research method with the Secretary of Muara Baru Village, the Head of Welfare and Services of Muara Baru Village, the Head of Village Representative Council (BPD), and the Muara Baru Village community. The results of this study revealed that there were three explanations. Firstly, the role of the village government as a regulator in efforts to improve the participation of the community in the development of infrastructure in Muara Baru Village had not yet been supported by specific policies issued by the village. However, the village government conducted village meetings (musyawarah desa), which served as a platform for residents to express their needs and aspirations regarding village development.

Secondly, the role of the village government as a dynamizer had not been fully optimized. The village government did not effectively perform its function as a dynamizer, as the distribution of information and community assistance had been uneven. As a result, many villagers had not experienced adequate support or socialization from the government. Thirdly, the village government's role as a facilitator had been well implemented. The government provided the necessary infrastructure and facilities to support development. By offering these resources, the village government hoped to encourage greater community participation in development activities. Therefore, the researcher suggests that the Muara Baru Village government is expected to formulate specific policies that regulate community participation in village infrastructure development. The village government should ensure that socialization efforts are conducted thoroughly and reach all segments of the community, including those living in remote areas. Moreover, the village government is expected to ensure equal access to the provided facilities for all residents, including those in remote regions, to promote equitable development across the village. The village government should also conduct regular evaluations of both the quality and quantity of available facilities.

Keywords: Dynamizer, Facilitator, Development, Village Government, Regulator.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA UPT. BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya" Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan mengenai kurangnya partisipasi masyarakat dalam rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan serta monitoring, dan kurangnya peranan aparatur desa dalam pelaksanaan tugasnya terutama untuk menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.

Peneliti menggunakan pendekatan teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid dalam Muhadam Labolo (2013,32) yaitu peran pemerintah memiliki 3 indikator yaitu, pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator. Dijelaskan sebagai berikut: Regulator, Pemerintah Desa menyusun dan menerbitkan peraturan yang menjadi acuan dasar bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah pemerintah desa memberikan bimbingan kepada masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk sosialisasi program-program desa. Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah pemerintah bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, memastikan aspirasi warga disampaikan dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa di Muara Baru memiliki tiga peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan infrastruktur. Pertama, sebagai regulator, belum ada kebijakan khusus yang dibuat. Kedua, peran sebagai dinamisator belum optimal karena sosialisasi dan pendampingan yang kurang merata, membuat banyak warga belum merasakan dukungan tersebut. Ketiga, sebagai fasilitator, pemerintah desa telah berhasil menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, dengan harapan masyarakat dapat lebih aktif dalam pembangunan.

Kesimpulan penelitian ini adalah Pertama, peran Pemerintah Desa sebagai regulator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur belum optimal, karena belum ada kebijakan khusus dan terdapat kendala dalam keterlibatan masyarakat. Kedua, peran sebagai dinamisator juga belum optimal akibat kurangnya sosialisasi dan pendampingan, sehingga banyak warga yang belum merasakan manfaatnya. Ketiga, peran sebagai fasilitator telah dilaksanakan dengan baik, dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, meskipun akses jalan masih rusak, mengganggu mobilisasi warga. Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Muara Baru diharapkan menyusun kebijakan khusus untuk mengatur partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut harus mencakup mekanisme pelibatan warga, prosedur pengajuan usulan, dan kontribusi masyarakat. Sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk di daerah terpencil, melalui pertemuan langsung atau perangkat desa. Pemerintah desa juga perlu memastikan akses yang sama terhadap fasilitas bagi semua warga dan melakukan evaluasi terhadap kualitas dan jumlah fasilitas yang tersedia agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Maudy Safitri

Nomor Mahasiswa : E1032211066

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 24 April 2025

Yang membuat pernyataan

(Maudy Safitri)

Nim: E1032211066

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju"

"Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini"

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

1. Allah SWT. Terimakasih ya Allah atas pertolongan kepada hamba yang lemah ini, terimakasih telah memberikan hamba kekuatan, kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini.
2. Kepada kedua orangtua penulis yang telah tiada, terimakasih telah menjadi alasan penulis bertahan selama ini, alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini menyelesaikan karya tulis ini. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada di tempat ini. Walaupun pada akhirnya saya harus berjuang sendiri tanpa penyemangat dari kalian berdua.
3. Saudara kandung saya Helmy dan Ramdani, serta bibi saya Rosmini yang turut memberikan doa, motivasi, dan dukungan. Yang selalu mengusahakan saya hingga sampai ditahap ini dan juga menjadi pengganti kedua orangtua saya yang telah tiada.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Saya menyadari penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
2. Dr. Sri Maryuni, M.Si selaku dosen pembimbing 1 saya yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing II dan Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dengan sabar dan tulus dalam memberikan pengertian, dukungan perhatian serta pengarahan.
4. Dr. S.Y. Pudjianto, M.Si selaku dosen Penguji 1.
5. Haunan Fachry Rohilie, S.I.P., MA selaku dosen Penguji II.
6. Wakil Dekan 1, II dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.

8. Kepada sahabat saya Putri Rizki Handayani dan Edy Imanuel yang sudah menemani penulis dari awal semester, meluangkan waktu, pikiran bahkan materi hingga samapai ditahap penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Rahanny Fitria yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri, Maudy. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Maudy. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimanapun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungannya. Aamiin.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikan dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi pembaca serta dapat dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini juga dapat menjadi referensi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

Pontianak, 24 April 2025

Penulis,

Maudy Safitri

E1032211066

DAFTAR ISI

COVER……i
LEMBAR PERSETUJUAN..... i
ABSTRAK..... ii
ABSTRACT iv
RINGKASAN SKRIPSI v
PERNYATAAN KEASLIAN..... vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI.....xi
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Identifikasi Masalah.....11
1.3. Fokus Penelitian.....11
1.4. Rumusan Masalah.....12
1.5. Tujuan Penelitian 12
1.6. Manfaat Penelitian 12
1.6.1.Manfaat Teoritis 12
1.6.2.Manfaat Praktis 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
2.1. Definisi Konsep 14
2.1.1. Peran Pemerintah 14
2.1.2. Pemerintah Desa 19
2.1.3 Partisipasi.....20
2.1.4. Partisipasi Masyarakat 22
2.1.5. Pembangunan.....29
2.2. Landasan Teori.....31
2.2.1. Teori Peran.....31
2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan 34
2.4. Alur Pikir Penelitian 35
Gambar 2.1 37
2.5. Pertanyaan Penelitian.....38
BAB III METODE PENELITIAN.....39
3.1. Jenis Penelitian 39
3.2. Langkah-langkah Penelitian.....40
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....41
3.3.1Lokasi Penelitian.....41
3.3.2 Waktu Penelitian 41
3.3. Subjek dan Objek Penelitian 43
3.4.1.Subjek Penelitian 43
3.4.2.Objek Penelitian.....43
3.5. Teknik Pengumpulan Data 44
3.6. Instrument atau alat pengumpulan data.....45
3.7. Analisis Data.....46
3.7.1.Teknik analisis data 46
3.7.2.Teknik Keabsahan Data.....47
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 50
4.1. Sejarah Desa 50
4.2. Kondisi Desa.....51
4.2.1.Letak Wilayah 51

4.2.2.Luas wilayah 53
4.3. Kelembagaan desa 56
4.3.1.Struktur organisasi pemerintahaan desa 56
4.3.2.Badan Permusyawaratan Desa 59
4.3.3.Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 60
4.3.4.Lembaga Adat Desa 62
4.3.5.Dinamika Konflik 62
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
5.1. Peran Pemerintah sebagai Regulator 65
5.2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator 70
5.3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator 77
BAB VI PENUTUP 83
6.1. Simpulan 83
6.2. Saran 85
6.3. Keterbatasan Penelitian 86
DAFTAR PUSTAKA 87

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*

1.1 Rancangan RPJM Desa Tahun 2020-2025 2
2.1 Daftar Kehadiran Peserta Musrembang Desa di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 7
3.1 Waktu Penelitian 42
4.1 Nama-Nama Kepala Desa Muara Baru 51
4.2 Pembagian Dusun Dan Luas Wilayah 53
4.3 Tingkat Pendidikan 54
4.4 Sebaran Kemiskinan 55
4.5 Data Perangkat Desa 58
4.6 Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Baru 60
4.7 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

2.1 Kerangka Piker Penelitian 37
4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya 57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *Halaman*

1. Pedoman Wawancara 88
2. Pedoman Observasi 92
3. Daftar Subjek Penelitian 93
4. Hasil Dokumentasi 94
5. Daftar Riwayat Hidup 96
6. Surat Tugas Penelitian 97

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan proses multidimensi yang terdiri dari struktur sosial, lembaga dan pertumbuhan ekonomi, upaya mengurangi kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan yang merupakan upaya yang terus berkelanjutan diharapkan dapat memberikan perubahan bagi manusia menjadi lebih baik. (Wijayanto 2016). Pemerintah saat ini telah memberikan kewenangan yang cukup baik untuk desa dalam mengelola pembangunannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal yang ada di desa tersebut. Dengan demikian pemerintah juga memberikan pendelegasian terhadap kepala desa untuk melaksanakan urusan pemrintah dengan baik dengan melibatkan masyarakat agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan bekerjasama dengan pemerintah karena masyarakat merupakan subjek dalam Pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 78 secara khusus mengatur tentang Pembangunan Desa. Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, Pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. (Endah 2015).

Tabel 1.1

Rancangan RPJM Desa Tahun 2020-2025

No	Kegiatan	Terealisasi
1	Pembangunan Prasaranan Kantor Desa	√
2	Pembangunan Posyandu/Polindes/PKD	√
3	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	**x**
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengerasan Jalan Desa	**x**
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	√
6	Pembangunan Balai Desa	√
7	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK	**x**
8	Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa	**x**
9	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	√
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Tani	**x**
11	Pembangunan Gapura/Batas Desa	**x**
12	Pelaksanaan Program Pembanguna/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	√
13	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	**x**
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	**x**
15	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	**x**
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga/Paud/TK/TPA/TKA/TPQ	**x**

Sumber: Kantor Desa Muara Baru 2024

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang pedoman Pembangunan desa, disebutkan bahwa perencanaan Pembangunan desa

adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan desa.

Pemerintah desa Menyusun perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan bidang pemberdayaan Masyarakat. Dalam pelaksanaan Pembangunan desa masyarakat.

Pembangunan yang melibatkan masyarakat seringkali disebut sebagai Pembangunan partisipatif atau Pembangunan berbasis masyarakat. Ini adalah pendekatan di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek Pembangunan di wilayah mereka. Prinsip-prinsip Pembangunan yang melibatkan masyarakat, partisipasi aktif, masyarakat berperan dalam semua tahap proyek, dari perencanaan hingga implementasi dan pemantauan, pemberdayaan. (Sangian, Dengo and Pombengi 2018). Masyarakat di beri kekuatan untuk mengambil keputusan terkait proyek-proyek yang mempengaruhi kehidupan mereka, keterbukaan dan transparansi informasi mengenai proyek dan penggunaan sumber daya harus tersedia bagi masyarakat secara terbuka, keadilan dan kesetaraan setiap anggota masyarakat, termasuk kelompok rentan, memliki kesempatan yang

sama untuk berpartisipasi, pembuat Keputusan bertanggungjawab kepada Masyarakat atas hasil dan pengelolaan proyek.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat penting karena masyarakat adalah pemilik kedaulatan dan subjek dalam pembangunan. Program-program yang dirancang dan dilaksanakan secara partisipatif memberikan kesempatan langsung kepada masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka, melaksanakan program tersebut, dan menikmati hasilnya.

Contoh Praktek dari Pembangunan yang melibatkan Masyarakat, yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Forum ini mengajak masyarakat untuk memberikan ide dan saran dalam perencanaan pembangunan, memastikan bahwa kebutuhan lokal terakomodasi. Kemudian Pembangunan infrastruktur, dimana Banyak desa membangun jalan, jembatan, dan fasilitas umum dengan partisipasi aktif masyarakat, yang berkontribusi tenaga dan material.

SOP (*Standard Operating Procedure*) pembangunan desa adalah serangkaian prosedur yang ditetapkan untuk memandu pelaksanaan proyek pembangunan di tingkat desa secara terstruktur dan efisien. SOP ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa berjalan lancar, sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa komponen umum dari SOP pembangunan desa: Perencanaan Awal, Persiapan Administratif, Persiapan Teknis dan Lingkungan.

Perizinan dan Persetujuan, Pelaksanaan Proyek, Pemantauan dan Evaluasi, Pengelolaan Risiko, Komunikasi dan Koordinasi, Pelaporan dan Evaluasi Akhir.

Manfaat SOP Pembangunan Desa, Pengelolaan yang Efisien, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kesinambungan. Dengan menerapkan SOP yang baik, pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan lebih terstruktur dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal serta memenuhi kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik merupakan dua dimensi yang berbeda namun saling melengkapi dalam konteks Pembangunan. Pembangunan fisik mengacu pada pembangunan yang melibatkan infrastruktur fisik atau bangunan konkret yang dapat dilihat, diraba, atau diukur secara langsung. Ini termasuk pembangunan atau pengembangan seperti, Infrastruktur Transportasi. Pembangunan non-fisik, atau sering disebut juga sebagai pembangunan sosial atau pembangunan manusia, merujuk pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia serta sistem sosial dan kelembagaan.

Pembangunan fisik dan non-fisik sering kali saling terkait dan mendukung satu sama lain. Pembangunan fisik yang baik, seperti pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai, dapat meningkatkan aksesibilitas ke layanan pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, pembangunan non-fisik yang efektif, seperti peningkatan dalam pendidikan dan kesehatan masyarakat, dapat memperkuat keberlanjutan penggunaan infrastruktur fisik dan meningkatkan manfaat sosial dari pembangunan tersebut. Dalam prakteknya, strategi pembangunan yang berhasil

seringkali memperhatikan baik aspek fisik maupun non-fisik secara serentak, dengan mengintegrasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Oleh karena itu masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan harus lebih ditingkatkan karena sasaran pembangunan adalah masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat tidak hanya objek tetapi subjek yang menentukan juga arah pembangunan yang bagaimana yang ingin dinikmatinya. Mengingat pentingnya upaya pemerintah Desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa. Dimana diharapkan pemerintah lebih berperan untuk memotivasi masyarakat, agar masyarakat mau ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pembangunan.

Table 1.2

Daftar Kehadiran Peserta Musrenbang Desa di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Absen
1	Suni	Ketua BPD	Hadir
2	Wiwit Apriadi	Pd kesehatan	Hadir
3	Helmi	Sekdes	Hadir
4	Suryadi	Kades	Hadir
5	Gunawan	Kaur umum	Hadir
6	Hartati	Sekretaris BPD	Hadir
7	Sulaiman	Kepala Dusun	Hadir
8	Mayudin	Kepala Dusun	Hadir
9	Mohli	Ketua RW 02	Hadir
10	Senen	Ketua RT 02	Hadir
11	Saheran	Ketua RT02	Hadir
12	Mohamat Sipon	Kasi kesj	Hadir
13	Rezayansyah	Kaur	Hadir
14	Heri	Masyarakat	Hadir
15	Sanudin	Anggota BPD	Hadir
16	Andre	Masyarakat	Hadir
17	Pauji	Anggota BPD	Hadir
18	Herman	Ketua RT 01/02	Hadir
19	Salmin	Pak Imam	Hadir
20	Zulkifli	Ketua RT 02	Hadir
21	Jupri	RT 001	Hadir
22	Sukardi	RT 004	Hadir
23	Arpan	RT 02	Hadir
24	Edi Hermansyah	Masyarakat	Hadir
25	Suherman	RW 01	Hadir
26	Saparmansyah	RT 01	Hadir
27	Avoi Fitri	Ketua RT 001	Hadir
28	Renawati	RT 001	Hadir
29	Sumiyati	RT 001	Hadir
30	Irwansyah	Ketua RT	Hadir
31	Amazia f. Hutapea	Bidan Desa	Hadir
32	Norlisa	KPM	Hadir
33	Kasmiah	Kasipem	Hadir
34	Razali	Anggota BPD	Hadir
35	Sunes	RW 001	Hadir
36	Buari.S	PD Kec	Hadir
37	Mafhud Puad	Kaur Perencanaan	Hadir

Sumber: Kantor Desa Muara Baru 2024

Pentingnya peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat pada pembangunan infrastruktur adalah agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan dengan cara memfasilitasi pelaksanaan dan juga menggerakkan partisipasi Masyarakat. Di Desa Muara Baru yang terletak di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya peneliti menemukan beberapa masalah diantaranya: partisipasi dalam rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan masih kurang, dalam implementasinya keterlibatan partisipasi Masyarakat terjadi hanya dalam hal pelaksanaan kegiatan dan menerima apapun hasilnya. Sedangkan dalam proses perencanaan Pembangunan masyararakat belum berpartisipasi aktif. Dapat dilihat dari kehadiran peserta musrenbang pada tabel 1.2, kehadiran peserta musdus dan juga kehadiran peserta musdes yang kerap kali hanya di hadiri oleh aparat desa, BPD, tokoh Masyarakat, RT/RW. Dari 80 undangan hanya 36-37 yang datang dan Masyarakat yang hadir hanya beberapa orang saja, Masyarakat yang hadir pun di dominasi oleh laki-laki, partisipasi Perempuan masih rendah. Dari pengamatan pra survey penulis, alasan Masyarakat malas atau tidak hadir dalam musyawarah perencanaan Pembangunan tersebut adalah, adalah Masyarakat menganggap pelaksanaan musyawarah hanya sebatas formalitas. Sedangkan yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah Pembangunan pun hanya datang dan mendengarkan, dapat dikatakan Masyarakat pasif dalam partisipasi dan cenderung diam, hanya mengikuti dan menyetujui pendapat perwakilan masyarakat karena kurangnya motivasi untuk berpartisipasi dalam Pembangunan. Dari hal tersebut maka peneliti menilai partisipasi Masyarakat masih relatif rendah.

Kemudian juga dilihat dari kondisi nyata sementara tentang aparat Desa Muara Baru. Menurut pengamatan peneliti menunjukkan bahwa kurangnya peranan Kepala Desa selaku aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya terutama untuk menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Pemerintah Desa juga dianggap belum mampu menggerakkan masyarakat dan mengakomodir aspirasi Masyarakat yang membuat mereka malas untuk datang dalam musyawarah. Kemudian informasi yang di berikan kepada ketua RT masing-masing sangat kurang jelas dan tidak pasti. Sehingga masyarakat desa merasa informasi tersebut belum tentu pasti adanya dan membuat masyarakat enggan untuk mengikuti rapat tersebut.

Musyawarah Desa dan Musyawarah Dusun diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Permendesa No. 16 Tahun 2019. Musdes melibatkan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk membahas isu strategis seperti perencanaan dan pengelolaan desa. Musdes harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Sedangkan Musdus berfungsi sebagai forum untuk penggalian gagasan dari Masyarakat dusun yang kemudian dibawa ke Musdes. Keputusan dalam kedua forum ini harus berdasarkan musyawarah mufakat.

Dari permasalahan tersebut, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan dari pemerintah setempat khusus nya pemerintah Desa Muara Baru. Dalam memainkan perannya dalam Pembangunan desa, dalam proses penanggulangannya dan pemerintah desa juga harus melihat setiap kebijakan-kebijakan yang akan

diimplementasikan atau yang akan dilaksanakan, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, maupun melalui peraturan daerah yang akan di keluarkan maupun yang akan dijalankan, sedangkan masyarakat sendiri yang akan di posisikan untuk menilainya, apakah kebijakan-kebijakan tersebut dapat diakatakan sebagai salah satu pemecah masalah ataukah sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru lagi dalam pembangunan tersebut.

Dalam Pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur dalam proses pembangunan desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus terlebih dahulu di dorong oleh pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah desa. Pada dasarnya, menggerakkan partisipasi merupakan salah satu tujuan dari Pembangunan desa itu sendiri diadakan untuk pembangunan berarti bahwa secara langsung terkena kebijkan dan kegiatan Pembangunan. Dalam hal ini masyarakat dianggap paling mengetahui kondisi lingkungan, sehingga perlu melibatkan masyarakat baik dalam pembangunan kebijakan maupun implementasinya.

Masyarakat sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab masyarakatlah yang dianggap lebih tau kondisi lingkungannya. Mengingat pentingnya peran pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun desa, hal ini tentu saja membuat pemerintah desa Muara Baru tidak ketinggalan untuk mewujudkannya. Dimana diharapkan pemerintah lebih berperan untuk memotivasi masyarakat, agar masyarakat mau ikut serta berpartisipasi dalam

pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur yang ada di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian "Peran Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya".

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pemerintah desa belum mampu menggerakkan dan mengakomodir aspirasi Masyarakat.
2. Minimnya keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan Keputusan tentang Pembangunan infrastruktur desa.
3. Pemerintah Desa kurang jelas dalam memberikan informasi kepada

Masyarakat terkait Pembangunan infrastruktur desa.

1.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan peneliti, agar penelitian yang dilakukan baik dalam mencari data-data lapangan maupun dalam menganalisis data lapangan yang telah terkumpul tersebut memiliki arah yang jelas fokusnya. Maka penelitian ini memfokuskan pada Peran Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan infrastruktur Desa di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan penejelasan pada bagian latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini adalah untuk Bagaimana Peran Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan infrastruktur Desa di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Peran Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalan Pembangunan infrastruktur Desa di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan, sehingga dapat mengembangkan teori-teori khususnya di ilmu pemerintahan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya agar dalam Pembangunan Desa selalu melibatkan Masyarakat baik itu berbentuk fisik maupun non-fisik.
2. Untuk masyarakat, agar dapat membantu dalam pembelajaran, pemecahan masalah sehari-hari, dan pemantauan perkembangan terkini dan agar

masyarakat desa lebih paham pentingnya partisipasi masyarakat dan masyarakat lebih aktif ikut andil dalam pembangunan desa.

3. Untuk peneliti lain agar bisa memberi informasi pengetahuan baru, mempersempit ruang lingkup, membantu memecahkan masalah dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap desa.